

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah adalah suatu lembaga profesional yang bertujuan membentuk anak didik menjadi manusia dewasa yang berkepribadian matang dan tangguh, yang dapat dipertanggungjawabkan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan dirinya sendiri. Orang tua tidak memiliki waktu yang cukup dan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mendidik anak mereka menjadi seperti yang mereka harapkan, sehingga mereka mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di sekolah. Tanggung jawab ini diberikan kepada para guru dan tenaga kependidikan yang lainnya. Itulah sebabnya guru harus dididik dalam profesi kependidikan agar memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Hal ini mungkin dilakukan jika guru tersebut adalah seorang yang profesional (Hamalik, 2009:6).

Seorang guru yang profesional adalah guru yang mengedepankan mutu dalam kualitas layanan dan produknya. Layanan guru harus memenuhi standarisasi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan pengguna serta memaksimalkan kemampuan peserta didik berdasarkan potensi dan kecakapan yang dimiliki masing-masing individu. Individu-individu tersebut diharapkan mampu bersaing dalam dunia akademisi dan dunia kerja yang tidak lain berfokus pada mutu setelah lulus dari sekolah (Yamin, 2010:28).

Seorang guru yang profesional juga ditandai dengan adanya sertifikat pendidik yang didapat melalui program sertifikasi guru. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa seorang guru yang profesional adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma IV (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan.

Mulyasa dalam bukunya "Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru" menyebutkan bahwa sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru layak untuk diberikan izin dan kewenangan mengajar serta prosedur yang digunakan untuk memberikan jaminan tertulis bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai guru (2008:34)

Pada bulan Februari tahun 2012 lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengadakan pelaksanaan Uji Kompetensi Awal (UKA) bagi guru yang akan mengikuti sertifikasi. Materi yang diujikan adalah materi yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik dan profesional guru. Namun hasil yang didapatkan belum memuaskan, hal ini ditandai dengan nilai rata-rata nasional UKA yang hanya 42.25 dengan standar deviasi 12.72. Angka ini menandakan bahwa rata-rata kompetensi guru di Indonesia hanya 42.25 %. Nilai rata-rata tertinggi diperoleh Provinsi DIY dengan nilai rata-rata 50.1 dan nilai rata-rata terendah diperoleh Provinsi Maluku dengan nilai rata-rata 34.5. Tabel

1.1. memperlihatkan data 10 provinsi dengan nilai UKA tertinggi dan 5 provinsi dengan nilai UKA terendah.

Tabel 1.1. 10 Provinsi dengan Nilai UKA Tertinggi dan 5 Provinsi dengan Nilai UKA Terendah

No	Provinsi	Nilai Rata-rata
10 Provinsi dengan Nilai UKA Tertinggi		
1	Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	50.1
2	DKI Jakarta	49.2
3	Bali	48.9
4	Jawa Timur	47.1
5	Jawa Tengah	45.2
6	Jawa Barat	44.0
7	Kepulauan Riau	43.8
8	Sumatera Barat	42.7
9	Papua	41.1
10	Banten	41.1
5 Provinsi dengan Nilai UKA Terendah		
1	Maluku	34.5
2	Maluku Utara	34.8
3	Kalimantan Barat	35.4
4	Kalimantan Tengah	35.5
5	Jambi	35.7

Sumber Data: Jawa Pos Group Online 2012

Pada Tabel 1.1. tersebut terlihat bahwa Provinsi Jawa Barat masuk peringkat 10 besar di urutan ke-6 provinsi dengan nilai UKA tertinggi dengan nilai rata-rata 44.0. dan berada di atas nilai rata-rata nasional (42.25). Data ini menunjukkan bahwa rata-rata kompetensi guru di Provinsi Jawa Barat hanya 44 %, dan ini juga bukan hasil yang bagus.

Duwi Tri Lestari, 2012

Model PKB...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Seorang guru juga dikatakan mampu mengemban tugasnya sebagai seorang yang profesional jika memiliki kinerja yang bagus. Yamin (2010:87) mengatakan bahwa kinerja seorang pengajar adalah perilaku atau respons yang memberi hasil yang mengacu kepada apa yang mereka kerjakan ketika menghadapi suatu tugas. Kinerja tenaga pengajar pada dasarnya lebih terfokus pada perilaku tenaga pengajar di dalam pekerjaannya, demikian pula perihal efektivitas tenaga pengajar adalah sejauh mana kinerja tersebut dapat memberi pengaruh kepada peserta didik. Seorang guru yang memiliki kinerja yang bagus akan terlihat dari potensi dan kecakapan yang dimiliki orang peserta didik. Namun kenyataannya, masih banyak tenaga pengajar yang berasal dari orang-orang di luar kependidikan, akibatnya terkadang tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap siswa dan masyarakat.

Sebagai contoh, pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan diri atau alam lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi siswa agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah (Depdiknas, 2007). Tetapi kesan yang timbul di sebagian peserta didik ternyata berbeda, pelajaran IPA dianggap membingungkan. Jika peserta didik di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) ditanyakan tentang pelajaran apa yang dianggap paling sulit dipahami, barangkali jawaban mereka adalah pelajaran IPA terutama untuk mata pelajaran fisika dan kimia, karena di dalamnya terdapat

Duwi Tri Lestari, 2012

Model PKB...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

banyak hal abstrak yang sukar dipahami dan banyak rumus yang harus dihapal. Kenyataan ini dapat dilihat dari hasil studi *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) yang dikoordinasikan oleh *International Educational Achievement* (IEA) yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. TIMSS adalah sebuah studi internasional tentang prestasi belajar siswa SMP untuk mata pelajaran matematika dan sains yang menunjukkan kemampuan IPA peserta didik SMP dan dilakukan setiap 4 tahun. Manfaat yang diperoleh bagi Indonesia dengan adanya studi ini antara lain adalah untuk mengetahui posisi peserta didik Indonesia dibanding peserta didik negara lain, sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan untuk peningkatan mutu pendidikan. Berikut adalah tabel peringkat prestasi sains siswa-siswa SMP antar negara peserta pada tahun 1999, 2003, dan 2007.

Tabel 1.2. Skor Rata-rata Prestasi Sains Siswa SMP antar negara peserta TIMSS

<u>TIMSS 1999</u>			<u>TIMSS 2003</u>			<u>TIMSS 2007</u>		
<u>No.</u>	<u>Negara</u>	<u>Skor</u>	<u>No.</u>	<u>Negara</u>	<u>Skor</u>	<u>No.</u>	<u>Negara</u>	<u>Skor</u>
1	Taiwan	569	1	Singapura	578	1	Singapura	567
2	Singapura	568	2	Taiwan	571	2	Taiwan	561
3	Hungaria	552	3	Korea Selatan	558	3	Jepang	554
4	Jepang	550	4	Hongkong	556	4	Korea Selatan	553
5	Korea Selatan	549	5	Estonia	552	5	Inggris	542
6	Belanda	545	6	Jepang	552	6	Hungaria	539
7	Australia	540	7	Inggris	544	7	Ceko	539
8	Ceko	539	8	Hungaria	543	8	Slovenia	538
9	Inggris	538	9	Belanda	536	9	Hongkong	530
10	Finlandia	535	10	Amerika Serikat	527	10	Rusia	530
11	Slowakia	535	11	Australia	527	11	Amerika Serikat	520
12	Belgia	535	12	Swedia	524	12	Lituania	519
13	Slovenia	533	13	Slovenia	520	13	Australia	515
14	Kanada	533	14	Selandia Baru	520	14	Swedia	511
15	Hongkong	530	15	Lituania	519		Internasional	500

Duwi Tri Lestari, 2012

Model PKB...

Lanjutan Tabel 1.2.

16	Rusia	529	16	Slowakia	517	15	Skotlandia	496
17	Bulgaria	518	17	Belgia	516	16	Italia	495
18	Amerika Serikat	515	18	Rusia	514	17	Armenia	488
19	Selandia Baru	510	19	Latvia	512	18	Norwegia	487
20	Latvia	503	20	Skotlandia	512	19	Ukraina	485
21	Italia	493	21	Malaysia	510	20	Yordania	482
22	Malaysia	492	22	Norwegia	494	21	Malaysia	471
23	Lituania	488	23	Italia	491	22	Thailand	471
	Internasional	488	24	Israel	488	23	Serbia	470
24	Thailand	482	25	Bulgaria	479	24	Bulgaria	470
25	Rumania	472	26	Yordania	475	25	Israel	468
26	Israel	468		Internasional	474	26	Bahrain	467
27	Siprus	460	27	Maldova	472	27	Bosnia Herzegovina	466
28	Maldova	459	28	Rumania	470	28	Rumania	462
29	Masedonia	458	29	Serbia	468	29	Iran	459
30	Yordania	450	30	Armenia	461	30	Malta	457
31	Iran	448	31	Iran	453	31	Turki	454
32	<u>INDONESIA</u>	<u>435</u>	32	Masedonia	449	32	Siria	452
33	Turki	433	33	Siprus	441	33	Siprus	452
34	Tunisia	430	34	Bahrain	438	34	Tunisia	445
35	Cili	420	35	Palestina	435	35	<u>INDONESIA</u>	<u>427</u>
36	Filipina	345	36	Mesir	421	36	Oman	423
37	Maroko	323	37	<u>INDONESIA</u>	<u>420</u>	37	Georgia	421
38	Afrika Selatan	243	38	Cili	413	38	Kuwait	418
			39	Tunisia	404	39	Kolombia	417
			40	Saudi Arabia	398	40	Libanon	414
			41	Maroko	396	41	Mesir	408
			42	Libanon	393	42	Algeria	408
			43	Filipina	377	43	Palestina	404
			44	Botswana	365	44	Saudi Arabia	403
			45	Gana	255	45	Maroko	402
			46	Afrika Selatan	244	46	Elsavador	387
						47	Botswana	355
						48	Qatar	319
						49	Ghana	303

Sumber: http://timssandpirls.bc.edu/TIMSS2007/PDF/T07_S_IR_Chapter1.pdf.

Duwi Tri Lestari, 2012

Model PKB...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa rata-rata nilai sains siswa SMP negara kita selalu berada di bawah rata-rata internasional dari tiga kali studi TIMSS. Pada tahun 1999 siswa Indonesia berada di peringkat ke-32, pada tahun 2003 berada di peringkat ke-37, dan pada tahun 2007 berada di peringkat ke-35. Prestasi siswa kita masih sangat memprihatinkan apalagi jika kita bandingkan dengan prestasi siswa negara tetangga kita Singapura yang pada tahun 2003 dan 2007 berada di peringkat pertama.

Berdasarkan kenyataan ini, pemerintah maupun instansi yang terkait di dunia pendidikan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan melakukan pergantian kurikulum. Pada Tahun 2004 diberlakukan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menggantikan kurikulum 1994. Namun masalah besar muncul lagi dengan pergantian kurikulum ini. Pada kurikulum sebelumnya untuk pelajaran IPA SMP hanya terdapat mata pelajaran fisika dan biologi dengan guru yang berbeda, Pada KBK, selain ditambahkan mata pelajaran kimia, hal lain yang menjadi kendala besar bagi guru IPASMP adalah mereka harus mengajarkan IPA secara terpadu, artinya seorang guru harus mampu mengajarkan mata pelajaran fisika, biologi dan kimia sekaligus, sedangkan kebanyakan dari mereka berkualifikasi fisika dan biologi.

Keadaan ini diperparah lagi dengan kenyataan bahwa buku pelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah lebih banyak berfokus pada bagaimana agar anak memiliki kemampuan mengerjakan tes untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian belajar yang baik,

dimana siswa mengalami dan dapat mempergunakan apa yang telah dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi ini menuntut agar guru IPA terus berupaya untuk meningkatkan kompetensinya dalam meningkatkan kemampuannya menguasai materi pembelajaran dan juga dalam menguasai model dan metode-metode pembelajaran. Upaya-upaya ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan disusunya UU no. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu (1) meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran (2) meningkatkan tanggung jawab profesi guru sebagai pengajar, pendidik, pelatih, pembimbing dan manajer pembelajaran (3) memberi kesempatan kepada guru untuk mengembangkan keprofesionalannya secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat (4) memberikan jaminan perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan profesi keprofesionalannya, dan (5) meningkatkan mutu pelayanan dan hasil pendidikan.

Tujuan tersebut dapat dicapai khususnya tentang Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) dengan cara sebagai berikut (1) pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir untuk kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional (2) pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru di tingkat satuan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah, pemda atau masyarakat sesuai dengan kebijakan strategis yang ditetapkan menteri (3) pengembangan kualifikasi dan kompetensi

guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemda atau masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemda (4) satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan guru, dan (5) pemerintah dan pemda wajib menyediakan anggaran untuk meningkatkan profesionalisme dan pengabdian guru (6) beban kerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sekurang-kurangnya 24 jam dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam satu minggu.

Selain untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya, PKB juga diakui sebagai salah satu unsur utama yang diberikan angka kredit untuk pengembangan karir guru khususnya dalam kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru selain kegiatan pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, bahwa setiap guru untuk dapat naik jenjang jabatan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi harus memenuhi persyaratan kenaikan pangkat. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit mengamanatkan bahwa guru wajib mengikuti PKB setiap tahun. Harapannya melalui kegiatan PKB akan terwujud guru yang profesional yang bukan hanya sekedar memiliki ilmu pengetahuan yang kuat, tuntas dan tidak setengah-setengah, tetapi tidak kalah pentingnya juga memiliki kepribadian yang matang, kuat dan seimbang.

Banyak cara yang dapat ditempuh guru untuk meningkatkan profesionalismenya antara lain dengan mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, workshop atau pemagangan baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, perguruan tinggi atau lembaga non pemerintah. Jumlah guru yang banyak tidak memungkinkan mereka bisa mengikuti kegiatan keprofesionalan seperti di atas karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan tersebut, salah satu caranya adalah dengan menyediakan satu wadah profesi untuk guru yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Menurut Pedoman Penyelenggaraan MGMP (1995), MGMP adalah forum/wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis di sanggar yang terdiri dari dua unsur yaitu Musyawarah dan Guru Mata Pelajaran. Musyawarah mencerminkan kegiatan dari, oleh, dan untuk guru, sedangkan Guru Mata Pelajaran adalah guru SMP dan SMA Negeri maupun Swasta yang mengasuh dan bertanggung jawab mengelola mata pelajaran yang ditetapkan di dalam kurikulum.

Melalui wadah MGMP ini diharapkan guru dapat tetap mempertahankan kualitas profesionalismenya sesuai tuntutan jaman dan kebutuhan sekolah. Selain itu, MGMP juga dituntut untuk berperan sebagai: (1) *reformer*, dalam *classroom reform*, terutama dalam reorientasi pembelajaran efektif, (2) mediator dalam pengembangan dan peningkatan sistem pengujian, (3) *supporting agency*, dalam inovasi manajemen kelas dan manajemen sekolah, (4) *collaborator*, terhadap unit terkait dan organisasi profesi yang relevan, (5) evaluator dan

developer school reform dalam konteks MPMBS, dan (6) *clinical dan academic supervisor*, dengan pendekatan penilaian appraisal (Hunaenah, 2008:13).

Tujuan MGMP yang tercantum di dalam buku Pedoman Penyelenggaraan MGMP seluruh Indonesia adalah:

1. Menumbuhkan semangat guru untuk meningkatkan kemampuan dan keahliannya dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan pembelajaran
2. Memeratakan kemampuan dan keahlian guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk menunjang usaha peningkatan pemerataan mutu pendidikan
3. Menampung segala permasalahan yang dihadapi guru dan memberikan solusi penyelesaiannya sesuai dengan karakteristik guru, mata pelajaran, sekolah, dan lingkungan
4. Membantu guru untuk memperoleh informasi tentang dunia pendidikan yang berkaitan dengan kegiatan, kebijakan pengembangan kurikulum dan mata pelajaran yang diampunya
5. Membantu guru dalam upaya menyediakan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar
6. Memberi kesempatan kepada guru untuk saling tukar informasi dan saling tukar pengalaman mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi serta pengembangan metode teknik mengajar

Berdasarkan tujuan dibentuknya forum MGMP ini, terlihat jelas bahwa idealnya seorang guru dituntut aktif dalam mengikuti kegiatan MGMP dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesionalismenya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian tentang seberapa besar pengaruh model PKB guru melalui kegiatan MGMP terhadap peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional serta dampaknya terhadap kinerja guru.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Permasalahan yang menyangkut kompetensi guru merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, guru wajib memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model PKB melalui kegiatan MGMP memberikan dampak terhadap kompetensi pedagogik dan profesional serta terhadap kinerja guru. Penulis membatasi hanya mengkaji kedua kompetensi ini karena dinilai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerjanya yang nantinya akan berdampak langsung terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Scales (2011:54) dalam bukunya *Continuing Professional Development in the Lifelong Learning Sector*, bahwa ada dua bagian penting yang berkaitan dengan profesional guru dan guru harus secara berkesinambungan meningkatkan

Duwi Tri Lestari, 2012

Model PKB...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

kemampuannya yaitu terkait kemampuannya dalam mengajarkan bidang studi yang diampu (kompetensi professional) dan kemampuannya mengelola pembelajaran di kelas (kompetensi pedagogik).

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini dirumuskan lagi ke dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran model PKB melalui kegiatan MGMP IPA SMP Kota Bandung?
2. Bagaimanakah gambaran kompetensi pedagogik guru IPA SMP Kota Bandung?
3. Bagaimanakah gambaran kompetensi professional guru IPA SMP Kota Bandung?
4. Bagaimanakah gambaran kinerja guru IPA SMP Kota Bandung?
5. Seberapa besar pengaruh model PKB melalui kegiatan MGMP terhadap kompetensi pedagogik guru?
6. Seberapa besar pengaruh model PKB melalui kegiatan MGMP terhadap kompetensi professional guru?
7. Seberapa besar pengaruh model PKB melalui kegiatan MGMP, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional terhadap kinerja guru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Duwi Tri Lestari, 2012

Model PKB...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui model PKB guru melalui kegiatan MGMP terhadap kompetensi pedagogik dan profesional serta terhadap kinerja guru.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui gambaran model PKB melalui kegiatan MGMP IPA SMP di Kota Bandung
- b. Mengetahui gambaran kompetensi pedagogik guru IPA SMP Kota Bandung
- c. Mengetahui gambaran kompetensi profesional guru IPA SMP Kota Bandung
- d. Mengetahui gambaran kinerja guru IPA SMP Kota Bandung
- e. Mengetahui pengaruh antara model PKB melalui kegiatan MGMP terhadap kompetensi pedagogik guru IPA SMP Kota Bandung
- f. Mengetahui pengaruh antara model PKB melalui kegiatan MGMP terhadap kompetensi profesional guru IPA SMP Kota Bandung
- g. Mengetahui pengaruh antara model PKB melalui kegiatan MGMP, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional terhadap kinerja guru

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dianggap penting dilaksanakan karena hasilnya akan bermanfaat bagi sekolah dan pihak-pihak yang terkait.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menjadi sumbangan ilmu bagi perkembangan program PKB

- 2) Menjadi sumbangan ilmu manajemen khususnya manajemen tentang pemberdayaan kelompok-kelompok kerja
- 3) Menjadi referensi/rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang kajian yang sama

b. Manfaat Praktis

- 1) Menjadi salah satu referensi pembuatan kebijakan dalam penyelenggaraan kegiatan MGMP di Kota Bandung bagi instansi terkait seperti Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota
- 2) *Feedback* untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi model PKB melalui kegiatan MGMP bagi pengurus MGMP IPA SMP Kota Bandung

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan pemecahan masalah secara struktur dan sistimatis, maka penulis menyusun suatu bentuk penulisan sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, asumsi penelitian, hipotesis, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab. II Kerangka Teoritis

Duwi Tri Lestari, 2012

Model PKB...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Bab ini menguraikan beberapa konsep dasar tentang mutu pendidikan, Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), Continuing Professional Development (CPD), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), kompetensi, dan kinerja

Bab.III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, rancangan penelitian, variabel penelitian dan desain operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

Bab.IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang pembahasan atau analisis hasil penelitian atau hasil pengolahan data mengenai model PKB melalui MGMP dan pengaruhnya terhadap kompetensi pedagogik dan profesional serta dampaknya terhadap kinerja guru

Bab.V Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab terakhir menguraikan tentang kesimpulan sebagai pemaknaan peneliti secara terpadu terhadap semua hasil penelitian yang diperolehnya. Selanjutnya penulis mengemukakan rekomendasi yang ditujukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan dari hasil penelitian ini.